

Pemkot Tangerang akan Evaluasi Sejumlah Aturan

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan mengevaluasi sejumlah aturan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. PPKM darurat yang seharusnya selesai pada 20 Juli 2021, diperpanjang hingga 25 Juli 2021 oleh Presiden Joko Widodo.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnandya berujar, pihaknya baru saja menerima instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal perpanjangan PPKM darurat pada Rabu (21/7).

Oleh karenanya, Pemkot masih membahas dan mengevaluasi aturan tersebut bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tangerang. "Surat instruksi dari Menteri Dalam Negeri baru diterima. Hari ini baru akan dibahas dulu dengan Satgas Penanganan Covid-19," ucap Arief kepada awak media, Rabu.

Politikus Demokrat itu mengakui bahwa perpanjangan PPKM darurat merupakan hal yang penting untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Akan tetapi, menurut dia, sejumlah larangan yang tercantum dalam aturan itu masih harus dievaluasi. "Sekarang kami berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang terdesak, kemudian ada urusan kesehatan yang sama-sama kritis, makanya kami perlu ada pembahasan dengan Satgas Covid-19," kata Arief.

Jokowi sebelumnya menegaskan, setelah PPKM darurat diperpanjang akan ada relaksasi secara bertahap jika tren kasus Covid-19 menurun. "Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi. ● pp

Bupati Tangerang Dukung PPKM Diperpanjang

TANGERANG (IM)- Bupati Tangerang, Banten, Ahmed Zaki Iskandar siap mendukung pemerintah pusat terkait perpanjangan Pembatasan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali guna menekan angka penyebaran Covid-19. "Yang jelas kita dukung terkait perpanjangan PPKM ini. Kemarin pak Presiden sudah menginstruksikan untuk diperpanjang sampai tanggal 25 dan insya Allah kita akan ikuti," kata A Zaki di Tangerang, Rabu (21/7).

Ia mengatakan pelaksanaan PPKM itu dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan Covid-19. Menurut dia, tingkat efektivitas dari penerapan PPKM ini akan terlihat setelah dua pekan terakhir dengan adanya penurunan grafik kasus penyebaran Covid-19.

"Kami melihat tiga hari terakhir ini adanya penurunan yang signifikan. Mudah-mudahan antara 21-26 Juli 2021, kita bisa tekan penyebarannya," ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan PPKM diperpanjang hingga 25 Juli 2021, yang sebelumnya telah diberlakukan mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Presiden Jokowi menjanjikan PPKM bakal dilonggarkan secara bertahap mulai 26 Juli 2021 jika kasus Covid-19 di semua wilayah mengalami penurunan. "Jika tren kasus terus mengalami penurunan, pemerintah pada 26 Juli melakukan pembukaan bertahap," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/7). ● pp



UJI COBA DIGITALISASI DOKUMEN KESEHATAN

Petugas melayani calon penumpang yang ingin melakukan registrasi melalui aplikasi PeduliLindungi di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Aceh, Rabu (21/7). PT Angkasa Pura II (Persero) mulai memberlakukan uji coba digitalisasi dokumen kesehatan melalui aplikasi PeduliLindungi di 17 bandara agar calon penumpang lebih mudah dalam melakukan registrasi penerbangan.

1.174 Jenazah Covid-19 Telah Dimakamkan di Kab. Bogor

BOGOR (IM)- Sejak Januari 2021 hingga hari ini, sebanyak 1.174 jenazah sudah dimakamkan di 10 tempat pemakaman umum (TPU) khusus Covid-19 di Kabupaten Bogor. Dari ribuan jenazah tersebut, 575 jenazah di antaranya dimakamkan pada Juli.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU Khusus Covid-19 sejak Januari hingga Juni, tercatat ada 599 jenazah. Sementara, pada Juli saja terdapat 575 jenazah yang dimakamkan. Artinya, ada peningkatan pemakaman akibat Covid-19.

"Iya, tadi saya sampaikan selama bulan Juli itu 575 orang di 10 TPU khusus Covid, hanya bulan Juli. Jadi total 1.174 itu dari mulai Januari dan itu bukan hanya yang positif, tapi juga ada yang probable," kata Burhan kepada wartawan, Rabu (21/7).

Selain itu, lanjut dia, ribuan jenazah tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Bogor. Melainkan juga dari daerah lain seperti Jakarta dan Depok.

Burhan menegaskan, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor tidak dapat membatasi hanya warga Kabupaten Bogor saja yang boleh dimakamkan di TPU Khusus Covid-19 di Kabupaten Bogor. Sebab, hal tersebut terkait dengan kemanusiaan. "Jadi 1.174 itu total seluruhnya dimakamkan di TPU kita. Sekarang kita tidak bisa menyekat mana warga Bogor, warga Depok, warga Kota Bogor, warga Tangerang, dan sebagainya karena ini kemanusiaan," tegasnya.

Diketahui, saat ini terdapat 10 TPU khusus Covid-19 di Kabupaten Bogor, yakni TPU Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, TPU Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, TPU Giomas Kecamatan Giomas, TPU Cicadas Kecamatan Gunung Putri, TPU Cipejo Kecamatan Cileungsi, TPU Singasari Kecamatan Jonggol, TPU Jabon Mekar Kecamatan Parung, TPU Rancabungur Kecamatan Rancabungur, TPU Kadaga Kecamatan Cibungbulung, dan TPU Gorowong Kecamatan Parungpanjang.

Burhan melanjutkan, rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana menambah TPU khusus Covid-19 di lokasi lain. Saat ini, luas lahan di 10 TPU khusus Covid-19 yang bisa digunakan untuk makam Covid-19 juga menipis.

Kendati demikian, dia mengimbau masyarakat untuk tidak menghambat penambahan TPU khusus Covid-19 tersebut. Apalagi proses pemakaman Covid-19 tidak selalu dilakukan pada siang hari, bahkan dilakukan pada dini hari. "Jadi kita tambah lagi dan ada masyarakat sekitar TPU yang kelewatan, jadi tolong jangan sampai ada hambatan. Kadang-kadang pemakaman Covid itu kan tidak selalu konstan siang. Kadang jam 01.00 WIB, kadang subuh," ucapnya.

Dia menambahkan, adanya pemakaman-pemakaman tersebut merupakan bukti nyata bahwa Covid-19 itu nyata. "Jadi ini bukan mengada-ngada, kalau masih ada orang yg tidak percaya Covid-19 bisa datang ke TPU yang sudah mau penuh," katanya. ● gio



PERPANJANGAN PPKM DI BANDUNG

Suasana salah satu pusat perbelanjaan yang sepi di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/7). Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Kota Bandung kembali memperpanjang PPKM hingga 25 Juli mendatang dengan melonggarkan beberapa kebijakan guna mencegah penyebaran COVID-19.

TAK ADA DI RUMAH SAAT PENYALURAN

Penerima BST di Tangerang Bisa Ambil Langsung di Kantor Pos

Keluarga penerima manfaat (KPM) yang hendak mengambil sendiri BST, wajib membawa KTP elektronik dan KK. KTP yang dibawa yang elektronik, yang asli, bukan yang fotokopi, sama KK.

TANGERANG (IM)- Dana bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dapat langsung diambil di Kantor Pos Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Kepala Kantor Pos Tangerang, Mohamad Sarip beru-

jar, keluarga penerima manfaat (KPM) yang diizinkan mengambil BST langsung adalah mereka yang tidak berada di kediamannya saat pihak kantor pos menyalurkan bantuan. Kantor Pos Tangerang kemudian akan berkoordinasi dengan perangkat RT setempat

agar memberitahukan KPM yang tidak berada di kediamannya itu untuk mengambil BST mereka di kantor pos.

Adapun tenggat waktu pengambilan BST itu adalah 30 hari sejak pemberitahuan untuk mengambil bantuan. "Kami koordinasikan dengan RT kalau orangnya enggak ada di rumah, atau lagi pulang kampung. Nanti Pak RT yang nyuruh dia ke kantor pos sampai tanggal sekian," papar Sarip melalui sambungan telepon, Rabu (21/7).

Namun, bila penerima bantuan tak kunjung mengambil sampai batas waktu yang telah

ditentukan, BST itu otomatis dikembalikan ke Kemensos.

Dia menyatakan, bila ada KPM yang ternyata telah meninggal atau tidak dikenal, otomatis BST juga bakal dikembalikan ke Kemensos. "Kalau ada yang meninggal atau tidak dikenal, itu langsung kami kirimkan kembali ke negara, ke Kemensos," ucap Sarip. Akan tetapi, bila ada KPM yang telah meninggal dan memiliki ahli waris, bantuan tunai itu akan disalurkan ke ahli waris.

Dia menambahkan, KPM yang hendak mengambil sendiri BST wajib membawa KTP elektronik dan KK. "KTP

bawanya yang elektronik, yang asli, bukan yang fotokopi, sama bawa KK," tuturnya.

Pos Indonesia diketahui telah menyalurkan BST bagi KPM di Kota Tangerang mulai Selasa kemarin dengan skema dari rumah ke rumah atau door to door. Besaran bantuan yang disalurkan yakni Rp 600.000, terdiri dari bantuan untuk bulan Mei dan Juni 2021. Adapun jumlah KPM di Kota Tangerang sebanyak 163.021 keluarga.

Pada Selasa kemarin, Pos Indonesia telah membagikan BST kepada 444 KPM di Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. ● pp

KERAP TIMBULKAN POLUSI UDARA

Warga Pinang Keluhkan Tumpukan Sampah di TPS Liar

TANGERANG (IM)- Warga RT 5 RW 4 Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Tangerang, mengeluhkan aktivitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Liar yang terdapat di lingkungannya. Pasalnya, TPS liar tersebut dianggap mencemari lingkungan sekitar dan kerap meresahkan.

Ketua RT 5, Wawan mengatakan warga meminta aktivitas TPS liar tersebut segera dihentikan. Pasalnya, warga sudah tak nyaman. Setidaknya kata Wawan, terdapat 45 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak TPS liar tersebut.

"Intinya itu, kami minta disetop," ujarnya saat di hubungi Rabu (21/7).

Wawan mengatakan TPS liar tersebut dikelola oleh Alam Sutera. Karena lahan pembuangan sampah itu memang milik Alam Sutera.

"Itu sudah ada sekitar 5 bulan pembuangan sampah di situ, nah pas dibakar itu warga mengeluh karena asapnya sangat mengganggu," katanya.

Menurut Wawan, aktivitas pembuangan sampah dilakukan mereka setiap hari. Setidaknya, ada 5 mobil pickup yang membuang sampah di TPS liar tersebut.

"Warga sering mengeluh ke saya karena asapnya mengganggu pernapasan dan kenyamanan warga," kata Wawan.

Diakui Wawan, dirinya sempat melaporkan hal tersebut ke pihak Kelurahan Pakojan. Namun, sudah berjalan 5 bulan TPS liar tersebut masih beraktivitas.

"Katanya hari Senin, (19/7) kemarin. Kelurahan mau ditinjau lagi," katanya.

Dirinya pun berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera bertindak tegas.

"Saya berharap ada instansi yang bisa menghentikan itu semua, karena kesehatan warga disini sering mengeluh ke saya," pungkasnya. ● pp

Pimpinan Satpol PP Tangsel Sesalkan Anak Buahnya Bentak-bentak Pedagang

TANGSEL (IM)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyesalkan adanya petugas yang membentak-bentak kepada pedagang angkringan di Pamulang saat bertugas menegakkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan (Gakumda) Satpol PP Kota Tangsel, Sapta Mulyana. Menurutnya, kejadian itu sudah dilaporkan kepada pimpinan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja.

"Karena saya sendiri setiap memimpin apel selalu saya tekankan agar dalam penegakan Perda terkait PPKM Darurat, selalu saya tekankan, tetap tegas, ramah, dan humanis," ujarnya, kemarin.

Menurutnya, ketegasan menjadi hal yang tak terpisahkan, karena pihaknya juga tak ingin memanjakan masyarakat, tetapi yang perlu diingat adalah

berbicara apa yang terjadi saat ini, yang memang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Di luar kejenuhan, kesulitan ekonomi, dan juga berbagai faktor yang mengharuskan hal ini (penegakkan peraturan, red) kami lakukan. Bukan berarti kami harus membenarkan dengan cara kekerasan, membentak-bentak, apalagi bermain fisik," paparnya.

Sapta menjelaskan, pihaknya terus teguh berjalan masyarakat menjadi yang utama, dalam hal ini pihaknya juga tak menjaga kelompok tertentu, tetapi demi keamanan, kenyamanan dan terjaganya masyarakat secara umum, secara luas agar Kota Tangsel meraih zona hijau.

"Sehingga roda ekonomi segera pulih kembali, kehidupan masyarakat kembali aman, nyaman, tidak merasa terbelenggu berada di rumah, aktifitas masyarakat berjalan, usaha berjalan, dan juga kegiatan pendidikan, dan juga kegiatan lain dapat berjalan sebagaimana semestinya," tutupnya. ● pp

Pemkab Serang Pinjamkan Rumdis Sekda untuk Rawat Pasien Covid-19

SERANG (IM)- Rumah Dinas (Rumdis) Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Kabupaten Serang dipinjamkan kepada Rumah Sakit (RS) Sakit Kencana di Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan/ Kelurahan Cimuning, Kecamatan/ Kota Serang. Peminjaman gedung yang saat ini digunakan untuk Sekretariat Darma Wanita Kabupaten Serang itu untuk perawatan khusus pasien Covid-19.

Wakil Bupati (Wabup) Serang, Panji Tirtayasa mengatakan, peminjaman gedung lantaran kondisi Rumah Sakit Kencana saat ini mengalami overload. "Jadi (RS Kencana) minta pinjam pakai Gedung Darma Wanita atau Rumah Dinas Sekda sementara selama masa pandemi Covid-19," ujar Panji usai menghadiri penandatanganan perjanjian pinjam pakai bangunan gedung antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan Kepala RS Kencana di Aula KH. Syam'un, Rabu (21/7).

Panji menjelaskan bahwa saat ini lonjakan pasien Covid-19 sangat luar biasa. Sehingga, ruang-ruang perawatan yang tersedia di RS Kencana sudah tidak mencukupi lagi. Jadi, peminjaman gedung Darma Wanita tersebut mulai digunakan tanggal 26 Juli sampai akhir Desember 2021.

"Tapi kalau masa pandemi sudah selesai, gedung akan digunakan lagi untuk Darma Wanita. Maka, untuk kegiatan Darma Wanita dialihkan ke Gedung Korpri," terang Panji.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala RS Kencana, Mayor dr Muchlas Fahmi, Dandim Kesay Serang, Letkol dr Dedi Herlambang, Dandim 0602/Serang, Kolonel Inf Suhardono, Asda I, Nanang Supriatna, Asda III, Ida Nuraida, Inspektur, Rahmat Jaya, Kepala Dinkes, dr Sukmayadi, Dirut RSDP, dr Rahmat Setiadi, Kepala BKPSDM, Muhammad Abdul Ishak Abdul Raup, Kepala DKBP3A, Tarkul Wasit, dan Plt Sekretaris Diskominfo, Hartono.

Sementara Kepala RS Tingkat IV Kencana Serang, Mayor dr Muchlas Fahmi mengatakan peminjaman gedung darma wanita milik Pemkab Serang lantaran tempat tidur atau bed occupancy rate di RS Kencana sudah mencapai 65 persen dari total sebanyak 71 unit bed.

Bahkan, ruangan yang dipertukarkan bukan untuk pasien covid-19 pun saat ini digunakan untuk pasien Covid-19.

"Hal itu sangat membahayakan tenaga kesehatan dan anggota RS Kencana karena apa, tempat itu dipersiapkan bukan untuk pasien Covid sehingga kami sangat membutuhkan sekali gedung yang berdekatan dengan RS agar semua bisa terkendali.

Dengan pinjam gedung mungkin daya tampung untuk masyarakat banyak yang akan kita rawat," ungkapnya.

Muchlas menjelaskan, setiap pasien Covid-19 yang datang RS Kencana dalam kondisi berat di

mana membutuhkan perawatan.

"Kalau yang tidak berat, kondisinya ringan dia tidak akan ke RS, lebih baik mereka isoman. Jadi yang datang ke RS pasti harus membutuhkan pertolongan kondisinya sudah sesak napas. Terlebi ruang ICU kami pun antre, maka kami pun akan menambah 10 bed lagi di ruang ICU," jelasnya.

Untuk saat ini, papar Muchlas, tempat tidur atau bed occupancy rate di RS Kencana tersedia sebanyak 71 unit dan sudah terisi sebanyak 65 unit bed. Dengan dipinjamkan gedung darma wanita dia merinci dapat menampung sebanyak 30 bed.

"Sudah kami tinjau bisa nampung sekitar 30 bed dan ruangan terpisah, ini akan menguntungkan semua pihak terutama tenaga kesehatan terhindar dari penularan karena pasien akan terisolasi lebih enak," terangnya.

"Kalau sekarang masuk RS Kencana tidak bisa membedakan mana pasien Covid atau bukan, tapi kalau sudah digunakan gedung darma wanita akan lebih terjaga, orang lebih tahu kalau yang di situ pasien Covid jadi lebih aman," paparnya.

Meski demikian, Muchlas tidak bisa memastikan dari mana asal pasien Covid-19 atau bukan pasien Covid-19 yang datang ke RS Kencana. "Kami tidak melihat darimana yang pasti kami membedakan tentara atau masyarakat, sekarang rata-rata masyarakat mencapai 80 persen kalau TNI hanya 20 persen," tuturnya. ● pra



PENYALURAN DAGING KURBAN SAAT PPKM

Panitia menyalurkan daging kurban ke rumah warga di kawasan Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (21/7). Penyaluran daging kurban dengan cara mendatangi langsung ke rumah-rumah warga dipilih panitia tersebut untuk menghindari kerumunan dan keriuhan masyarakat saat pembagian daging di masa PPKM.